

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN MELALUI DISKRESI TERHADAP
PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

Oleh:

Laras Sekar Wangi

41151010160021

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program
studi hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANG BUANA
BANDUNG
2020**

***IMPLICATION OF THE LAW OF REPUBLIC INDONESIA NO. 30
YEAR 2014 ABOUT GOVERNEMENT ADMINISTRATION
THROUGH DISRECTION ON GRANTING INDONESIAN
CITIZENSHIP STATUS***

Arranged by :

Laras Sekar Wangi

41151010160021

THESIS

*To meet one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Law Degree in law study
program*

Specialized program : Constitutional Law



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2020

Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laras Sekar Wangi

NPM :41151010160021

Bentuk Penulisan : SKRIPSI

Judul : IMPLIKASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MELALUI DISKRESI TERHADAP PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan.

Laras Sekar Wangi

41151010160021

ABSTRAK

Dalam memberikan status kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing, Pemerintah harus mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Tetapi Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Archandra, meskipun belum memenuhi syarat yang dimuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa Permohonan pewarganegaraan harus sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Permasalahan dalam penelitian tugas akhir ini adalah bagaimanakah kewenangan yang dimiliki pemerintah memberikan kebijakan kewarganegaraan dan apakah diskresi kemenkumham dalam pemberian status kewarganegaraan republik indonesia terhadap arcandra tahar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian Mengenai tugas akhir ini termasuk jenis penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut pendapat Sudarto pengertian metode normatif dapat dijelaskan sebagai berikut metode yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya melihat hubungan logis atau anti logis , ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, maka metode ini tidaklah kurang yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan diskresi dalam pemberian diskresi kemenkumham dalam pemberian status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada archandra tahar bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu diskresi yang sewenang-wenang, serta tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas non diskriminasi, asas kepastian hukum.

ABSTRACT

In granting Indonesian citizenship status to foreigners, the Government must follow Law No. 12 of 2006 on Citizenship. But the Ministry of Law and Human Rights in granting citizenship status of the Republic of Indonesia to Archandra, although not yet qualified contained in Article 9 of Law No. 12 of 2006 that application for citizenship must have been located in the territory of the Republic of Indonesia at least 5 consecutive years or at least 10 years in a row. The problem in this final task study is how the authority of the government to provide citizenship policy and whether the discretion of the ministry in granting citizenship status of the republic of Indonesia to arcandra tahar is in accordance with Law No. 30 of 2014 on Government Administration.

The research method used is normative juridical using primary, secondary and tertiary legal materials. Your research on this final task includes normative legal research or library law research. In Sudarto's opinion the definition of normative methods can be explained as following juridical methods in a narrow sense is the use of methods that only look at logical or anti-logical relationships, or in other systematic ways, in the whole device of norms. On the contrary, if the view is not only the relationship in the device of mere norms, but also even especially seen the importance of the social effect of the establishment of norms (law) so that jutru is seen the importance of the background of society, then this method is not less juridical anyway, is juridical in a broad sense.

From the results of the study concluded that the use of discretion in the provision of discretion in granting citizenship status of the Republic of Indonesia to archandra tahar contrary to Article 32 of Law No. 30 of 2014 on Administrative Administration is an arbitrary discretion, and is not in accordance with the General Principles of Good Governance which is the principle of non-discrimination, the principle of legal certainty.

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, dan hidayahnya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MELALUI DISKRESI TERHADAP PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA”**, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing tugas akhir penulisan Skripsi ini, yang tidak pernah lelah dalam memberi masukan serta semangat dalam membimbing selama mengerjakan skripsi, memberi nasehat, motivasi, dalam membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wali Dosen
10. Orangtua yaitu Bapak Sutarno dan Ibu Yeti Rohaeti, serta saudara yaitu Kak Arief Rahyono, Kak Lily, Hisyam, Febri, Reni yang selalu memberi dukungan dan menghibur
11. Teman-teman kelas A1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, KKNM 35 HaurWangi, serta tak lupa dari Kelas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang sama-sama berjuang dan saling menyemangati satu sama lain.

Bandung ,26 Agustus
2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, DISKRESI DAN KEWARGANEGARAAN	
A. Kewarganegaraan Republik Indonesia	
a. Rakyat Negara.....	17
b. Asas Kewarganegaraan.....	18

c. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.....	20
d. Pewarganegaraan (Naturalisasi).....	23
e. Tata Cara Memperoleh, Kehilangan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.....	30

**B. TINJAUAN UMUM MENGENAI DISKRESI MENURUT UU NO. 30
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

a. Pengertian Administrasi Pemerintahan dan Diskresi.....	31
b. Asas-asas Pemerintahan Yang Baik Dan Ruang Lingkup Dan Asas.....	32
c. Diskresi, Lingkup Diskresi, Persyaratan Diskresi , Prosedur Diskresi.....	36

**BAB III KRONOLOGI PERKARA PEMBERIAN STATUS
KEWARGANEGARAAN INDONESIA MELALUI DISKRESI**

a. Pemberian Status Kewarganegaraan Arcandra Thahar Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Melalui Diskresi.....	41
b. Pemberian Status Kewarganegaraan Ezra Walian Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia.....	44

BAB IV ANALISIS KEWENANGAN DISKRESI TERHADAP PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA

1. Kewenangan yang Dimiliki Pemerintah Memberikan Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia..... 54
2. Tindakan Diskresi Kemenkumham dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Arcandra Tahar Sudah berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 66
- B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP